

9. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja Perangkat Daerah akan diawali dengan melakukan persiapan penyusunan renja, yang meliputi penyusunan rancangan keputusan oleh kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, lalu orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Kemudian dilakukan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahapan ini, Perangkat Daerah menyusun ranwal renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan ranwal renja berpedoman pada renstra. Hal ini bertujuan agar dapat menjadikan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam ranwal renja Perangkat Daerah dengan renstra Perangkat Daerah. Hasil perumusan ranwal renja lalu disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat tentang pendahuluan, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, renja dan pendanaan, serta penutup. Ranwal renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran kepala daerah. Penyempurnaan ranwal renja Perangkat Daerah ini mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada ranwal RKPD.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah.

RKPD Kota Blitar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada RPJMD maka tujuan dan sasaran RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2021 dan tahun 2026. Selain itu, penetapan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun

- 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp 8.817.011.113,00 dengan realisasi Rp.8.633.696.684,00 atau 97,92%. Sisa anggaran 2,18% yang tidak terserap merupakan hasil efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.43.000.000,00 dapat tercapai Rp 23.891.170,00 atau 55,56%. Hal tersebut karena target pendapatan yang dimaksud merupakan retribusi sewa tanah dari pajak reklame. Sedangkan saat ini publikasi/promosi sebuah produk/jasa banyak dilakukan secara online sehingga pemasangan reklame secara fisik menjadi berkurang.

Capaian kinerja Tujuan Renja “Meningkatnya nilai investasi daerah” pada tahun 2023 adalah 11,54% dari target 0,36%. Capaian tersebut merupakan peningkatan realisasi investasi dari tahun sebelumnya (2022), dimana realisasi investasi tahun 2023 sebesar 385,06 milyar rupiah dan realisasi investasi tahun 2022 adalah 345,22 milyar rupiah. Realisasi investasi Tahun 2023 sebesar 385,06 milyar rupiah tersebut diatas merupakan kinerja Sasaran Renja yang tercapai 229,5% dari target 167,8 milyar rupiah. Sedangkan kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan rata-rata tercapai sesuai target. Untuk mengetahui lebih detail capaian kinerja pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan, berikut disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024. Capaian kinerja sub kegiatan tahun 2022 dan tahun 2023 tidak dapat dimunculkan atau nol (0) karena ada perubahan nomenklatur dan indikator kinerja sub kegiatan pada tahun 2024.

Pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar difokuskan pada:

1. Meningkatkan promosi investasi dengan melibatkan para pelaku usaha di Kota Blitar.
2. Meningkatkan pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) khususnya bagi pelaku UMKM.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal agar para pelaku usaha tertib dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan penanaman Modal) dan tertib dalam legalitas usahanya.
4. Mengawal Kajian Akdemis Kebijakan/Insentif Penanaman Modal hingga menjadi Perda.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	TUKUAN 1: Meningkatnya tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)	Nilai	A (85,47)	A (84,8)	A (85,66)	101	85,67 (A)	85,67 (A)	99,95%
	SASARAN 1: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)	Nilai	A (85,47)	A (84,8)	A (85,66)	101	85,67 (A)	85,67 (A)	99,95%
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,1 (Baik)	Indeks	84,16	84,2 (Baik)	84,65 (Baik)	100,53	84,5 (Baik)	84,5 (Baik)	99,29%
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100%
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	Dokumen					7	7	33,33%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	15	dokumen					5	5	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang /bulan					23	23	33,33%
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39	Dokumen					13	13	33,33%
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket					2	2	33,33%
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129	Orang					43	43	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket					1	1	33,33%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket					5	5	33,33%
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	Paket					3	3	33,33%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102	Paket					34	34	33,33%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket					1	1	33,33%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36	Dokumen					12	12	33,33%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Dokumen					25	25	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6	Paket					2	2	33,33%
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	Unit					7	7	41,18%
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit					1	1	100,00%
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	Dokumen					36	36	33,33%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	Dokumen					36	36	33,33%
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	9	Unit					3	3	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	183	Unit					61	61	33,33%
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit					0	0	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0	Unit					0	0	
	TUJUAN 2: Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	133,85	%	33,57	0,36	11,54	3205,69	0,42	0,42	0,31%
	SASARAN 2: Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	391	Milyar rupiah	345,22	167,8	385,06	229,5	387	387	98,98%
2.18.02	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	65	%	50	50	124,71	249	55	55	84,62%
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	3	Dokumen	0	1	1	100	1	1	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen					1	1	33,33%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3	Kerjasama					1	1	33,33%
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	3	Dokumen	-	-	-	-	1	1	33,33%
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	3	Dokumen					1	1	33,33%
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	Dokumen					1	1	33,33%
2.18.03	Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	60	%	43	45	45,2	100,4%	50	50	83,33%
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	300	%	100	100	100	100	100	100	33,33%
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	3	Dokumen					1	1	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal Kabupaten/ Kota									
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,7	%	99,53	99,5	99,71	100,2	99,5	99,5	99,80%
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4	%	57,54	3	87,81	2.927	3	3	75,00%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3434	Orang					1100	1100	32,03%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	Orang					4	4	40,00%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12411	Kegiatan usaha					3976	3976	32,04%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha									
2.18.05	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85	%	71,22	75	75,7	100,9	80	80	94,12%
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	375	Perusahaan	238	100	362	362	125	125	33,33%
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24	Masalah					7	7	29,17%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000	orang					300	300	30,00%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi	39	Kegiatan usaha					13	13	33,33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

No	Indikator	IKK/ IKU/ SPM	Target Kinerja SKPD Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
1	Persentase peningkatan investasi	IKK	0,30	0,36	0,42	0,47	0,53	33,57	11,54	0,42	0,47	0,53	Tercapai
2	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	IKU	167,2	167,8	387	389	391	345,22	385,06	387	389	391	Tercapai
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A	84,8 (A)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,71)	85,47 (A)	85,66 (A)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,71)	Tercapai

IKK (Indikator Kinerja Kunci) tahun 2023 tercapai melebihi target, yaitu 11,54% dari target 0,36%. Capaian tersebut karena IKU (Indikator Kinerja Utama) juga tercapai melebihi target, yaitu 385,06 milyar rupiah, meningkat dibanding tahun 2022. Keberhasilan tersebut karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi /iklim usaha yang semakin kondusif, kebijakan pemerintah yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin usaha dan pelaporan LKPM yang terus meningkat. Sedangkan untuk IKU Nilai SAKIP dapat tercapai sesuai target (dalam kategori predikat A).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar melayani 9 sektor Perizinan Berusaha dengan KBLI, 6 sektor Perizinan Berusaha Non KBLI, 12 sektor Perizinan Non Berusaha Non KBLI dan 46 jenis perizinan daerah.

Di bidang penanaman modal, DPMPTSP Kota Blitar berusaha meningkatkan daya tarik investasi bagi calon investor dengan menyelenggarakan promosi investasi melalui event “Soekarno Coffe Fest” dan keikutsertaan pada event promosi tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan untuk meningkatkan tertib pelaporan LKPM bagi pelaku usaha, dilaksanakan pembinaan dan pengawasan penanaman

modal melalui bimtek dan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar menghadapi permasalahan dan hambatan, yaitu:

- Kurangnya minat literasi masyarakat terhadap proses perizinan yang benar sehingga masih terjadi adanya pelanggaran akibat ketidaksesuaian legalitas izin yang dimiliki dengan kondisi di lapang.
- Laporan yang disajikan dalam sistem OSS RBA belum bisa memenuhi kebutuhan.
- Para pelaku usaha belum tertib dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- Naskah akademis Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal telah disusun, namun belum menjadi perda.
- Masih dibebani target retribusi daerah berupa sewa tanah reklame, padahal sesuai PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Sedangkan tantangan dan peluang Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam meningkatkan pelayanan adalah:

- Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 dan mulai operasional pada awal tahun 2025, diharapkan mampu mencapai tujuan dari kehadiran MPP tersebut yaitu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
- Untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik secara digital, agar dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah maka perlu dibangun sistem MPP Digital.
- Perubahan OSS dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA yang memiliki konsekuensi dengan aturan yang mengikutinya memerlukan penyebarluasan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat melalui berbagai media.

Mengacu pada tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar maka isu-isu penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang perizinan usaha baik melalui pendampingan dan/atau sosialisasi maupun publikasi media sosial dan elektronik.
2. Keberadaan MPP diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapai yaitu mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
3. Mengoptimalkan layanan Jempol Lisa (Jemput Bola Layanan Perizinan Usaha) agar legalitas usaha dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha di Kota Blitar.

4. Menyediakan data dan informasi perizinan serta penanaman modal baik secara digital maupun manual sehingga jika server pusat mengalami down, data manual masih tersedia.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Blitar

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.255.414.291	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.338.662.201	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				10.255.414.291	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.338.662.201	
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		<i>Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi</i>	60 persen	129.021.100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		<i>Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi</i>	60 persen	181.163.000	
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan</i>	1 dokumen	59.021.100	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan</i>	1 dokumen	71.163.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	43.762.400	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	46.154.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	1 Dokumen	15.258.700	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	1 Dokumen	25.009.000	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia</i>	1 dokumen	70.000.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia</i>	1 dokumen	110.000.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	60.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	50.000.000	
2,	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		<i>Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan</i>	55 persen	439.206.797	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		<i>Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan</i>	55 persen	463.531.900	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase potensi informasi yang dipromosikan</i>	100 persen	439.206.797	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase potensi informasi yang dipromosikan</i>	100 persen	463.531.900	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	439.206.797	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	463.531.900	
3,	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		<i>Persentase penerbitan izin sesuai SOP</i>	99,6 persen	520.583.500	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		<i>Persentase penerbitan izin sesuai SOP</i>	99,6 persen	600.093.514	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya</i>	4 persen	520.583.500	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya</i>	4 persen	600.093.514	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	1144 Pelaku Usaha	199.987.100	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	1144 Pelaku Usaha	223.606.014	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	3 Pelaku Usaha	132.431.500	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	3 Pelaku Usaha	106.902.900	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Terintegrasi secara Elektronik</i>					<i>Terintegrasi secara Elektronik</i>			
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	4135 Kegiatan Usaha	188.164.900	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	4135 Kegiatan Usaha	269.584.600	
4,	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		<i>Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	80 persen	406.818.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		<i>Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	80 persen	406.818.000	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM</i>	125 perusahaan	406.818.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM</i>	125 perusahaan	406.818.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	8 Kegiatan Usaha.	61.022.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	8 Kegiatan Usaha.	61.022.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	350 Pelaku Usaha	223.751.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	350 Pelaku Usaha	223.751.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	13 Kegiatan Usaha	122.045.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	13 Kegiatan Usaha	122.045.000	
5,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	84,8 persen	8.759.784.894	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	84,8 persen	5.687.064.587	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	100 persen	15.885.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	100 persen	16.399.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	1.904.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	2.100.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	13.980.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	14.299.400	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	100 persen	2.881.668.145	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	100 persen	2.977.928.187	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	23 Orang/bulan	2.880.284.145	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	23 Orang/bulan	2.976.192.187	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	13 Laporan	1.384.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	13 Laporan	1.736.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 persen	150.590.900	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 persen	161.233.300	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	27.900.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	49.667.500	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	43 Orang	122.690.900	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	43 Orang	111.565.800	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 persen	503.977.180	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 persen	549.659.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	24.793.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	38.232.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	124.385.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	131.734.800	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	24.544.880	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	26.646.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	34 Paket	55.650.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	34 Paket	57.750.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	30.291.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	32.125.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	18.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	25 Laporan	226.312.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	25 Laporan	245.170.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	100 persen	4.334.456.305	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	100 persen	972.835.600	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit	235.823.905	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit	82.439.400	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	654.055.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	854.417.400	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	3.444.576.800	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	35.978.800	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 persen	716.371.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 persen	829.938.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan	144.712.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan	138.256.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	36 Laporan	571.659.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	36 Laporan	691.682.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 persen	156.836.364	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 persen	179.061.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	103.518.864	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	110.832.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	61 Unit	53.317.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	61 Unit	67.197.500	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1.031.700	
					10.255.414.291					7.338.662.201	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Blitar

No	Usulan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB dan Label Halal bagi pelaku usaha	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kepanjenlor, Bendo, Kauman, Tanggung, Kepanjenkidul Ngadirejo	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	155 orang	Diakomodir tetapi tidak spesifik per kecamatan/ kelurahan tetapi dalam level kota
2	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30 orang	Diakomodir tetapi tidak spesifik per kecamatan/ kelurahan tetapi dalam level kota
3	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30 orang	Diakomodir tetapi tidak spesifik per kecamatan/ kelurahan tetapi dalam level kota

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tema pembangunan RKP 2024 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah Pemantapan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi daerah. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional tahun 2025.

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sebagai bagian dari Pemerintah Kota Blitar, mendukung dan berperan serta dalam mendukung arah pembangunan nasional dan Kota Blitar dengan meningkatkan investasi dan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan kepada masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dikaitkan dengan sasaran target kinerja, berikut disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 beserta indikator dan target, yaitu:

Tabel 3.2

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 – 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan 1 Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (Online Single Submission)	Jumlah realisasi investasi Tahun N –jumlah realisasi investasi Tahun N-1)/ jumlah realisasi investasi Tahun N-1 x 100%	0,36%	11,54%	0,42%	0,47%	0,53%
2	Sasaran 1 Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)		Jumlah realisasi investasi tahun berjalan	167,8	385,06	387	389	391
3	Tujuan 2 Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	Hasil nilai evaluasi SAKIP DPMPSTP oleh Inspektorat	A (84,8)	A (85,66)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,71)
4	Sasaran 2 Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah								

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tabel 3.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung Program Pencapaian Tupoksi
2.18.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
2.18.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
2.18.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
2.18.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
2.18.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
2.18.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
2.18.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.18.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
2.18.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
2.18.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
2.18.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.18.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
2.18.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
2.18.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
2.18.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
2.18.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
2.18.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
2.18.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.02.2.0 1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	
2.18.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.02.2.0 1.0003	Fasiitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKN di daerah	
2.18.02.2.0 2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	
2.18.02.2.0 2.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	
2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.03.2.0 1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	
2.18.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.04.2.0 1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	
2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
2.18.04.2.0 1.0007	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.04.2.0 1.0008	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	"Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.05.2.0 1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	
2.18.05.2.0 1.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	
2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan turunan dari program mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar 2021-2026 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pendanaan indikatif pada rancangan awal RKPD sebesar Rp7.338.662.201. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disajikan pada tabel 4.2 pada bab ini.

Pelaksanaan Rencana Kerja selalu dievaluasi melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga diketahui keberlanjutan program kegiatan dan permasalahan atau hambatan bila ada. Demikian pula Renja 2025 menindaklanjuti langkah perbaikan pada LKjIP 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 pada Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat	Menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (Tahap II) dan Launching	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan pelayanan perizinan	-> Menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha) -> Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Program pelayanan penanaman modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3	Meningkatkan promosi investasi	Mengadakan Soekarno Coffe Fest	Program promosi penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
4	Meningkatkan monitoring pelaporan LKPM secara berkala	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
5	Meningkatkan regulasi penanaman modal	Menyusun perda pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara On Line	Pengembangan aplikasi SIMIJIN	Program/kegiatan tercover di dinas teknis (Diskominfo)

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama PD: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi</i>	Kota Blitar	60 persen	181.163.000			65 persen	135.472.155
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan</i>	Kota Blitar	1 dokumen	71.163.000			1 dokumen	61.972.155
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Kota Blitar	1 Dokumen	46.154.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	45.950.520
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	Kota Blitar	1 Dokumen	25.009.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	16.021.635
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia</i>	Kota Blitar	1 dokumen	110.000.000			1 dokumen	73.500.000
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Kota Blitar	1 Dokumen	60.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	52.500.000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	Kota Blitar	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	21.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan</i>	Kota Blitar	55 persen	463.531.900			60 persen	461.167.137
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase potensi informasi yang dipromosikan</i>	Kota Blitar	100 persen	463.531.900			100 persen	461.167.137
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>	Kota Blitar	1 Dokumen	463.531.900	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	461.167.137
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase penerbitan izin sesuai SOP</i>	Kota Blitar	99,6 persen	600.093.514			99,7 persen	546.612.675
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya</i>	Kota Blitar	4 persen	600.093.514			4 persen	546.612.675
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	Kota Blitar	1144 Pelaku Usaha	223.606.014	Pendapatan Bagi Hasil		1190 Pelaku Usaha	209.986.455
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	Kota Blitar	3 Pelaku Usaha	106.902.900	Pendapatan Bagi Hasil		3 Pelaku Usaha	139.053.075

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	Kota Blitar	4135	269.584.600	Pendapatan Bagi Hasil		4300 kgiatan usaha	197.573.145
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	Kota Blitar	80 persen	406.818.000			85 persen	427.158.900
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM</i>	Kota Blitar	125	406.818.000			125 perusahaan	427.158.900
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	Kota Blitar	8 Kegiatan Usaha.	61.022.000	DAK Non Fisik		9 masalah	64.073.100
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	Kota Blitar	350 Pelaku Usaha	223.751.000	DAK Non Fisik		350 Pelaku Usaha	234.938.550

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	Kota Blitar	13 Kegiatan Usaha	122.045.000	DAK Non Fisik		13 Kegiatan Usaha	128.147.250
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	Kota Blitar	84,8	5.687.055.787			85,1 (Baik)	5.580.500.089
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	Kota Blitar	100 persen	16.399.900			100 persen	15.590.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Blitar	7 Dokumen	2.100.500	Pendapatan Bagi Hasil		7 Dokumen	1.950.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kota Blitar	5 Laporan	14.299.400	Pendapatan Bagi Hasil		5 Laporan	14.000.000
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	Kota Blitar	100 persen	2.977.928.187			100 persen	3.025.751.552
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Blitar	23	2.976.192.187	Pendapatan Bagi Hasil		23	3.024.298.352

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Kota Blitar	13 Laporan	1.736.000	Pendapatan Bagi Hasil		13 Laporan	1.453.200
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	Kota Blitar	100 persen	161.233.300			100 persen	158.120.445
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kota Blitar	2 Paket	49.667.500	Pendapatan Bagi Hasil		2 Paket	29.295.000
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kota Blitar	43 Orang	111.565.800	Pendapatan Bagi Hasil		43 Orang	128.825.445
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	Kota Blitar	100 persen	549.659.100			100 persen	529.436.880
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Blitar	1 Paket	38.232.700	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	26.032.965
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Blitar	5 Paket	131.734.800	Pendapatan Bagi Hasil		5 Paket	130.604.670
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kota Blitar	3 Paket	26.646.600	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	26.032.965
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Blitar	34 Paket	57.750.000	Pendapatan Bagi Hasil		34 Paket	58.432.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Blitar	1 Paket	32.125.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	31.806.180
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Blitar	12 Dokumen	18.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Dokumen	18.900.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Blitar	25 Laporan	245.170.000	Pendapatan Bagi Hasil		25 Laporan	237.627.600
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	Kota Blitar	100 persen	972.835.600			100 persen	934.373.480
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kota Blitar	2 Unit	82.439.400	Pendapatan Bagi Hasil		2 Unit	247.615.100
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Blitar	5 Unit	854.417.400	Pendapatan Bagi Hasil		5 Unit	686.758.380
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Blitar	0 Unit	35.978.800	Dana Transfer Umum - DAU		0 Unit	0
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	Kota Blitar	100 persen	829.938.000			100 persen	752.189.550
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Blitar	36 Laporan	138.256.000	Pendapatan Bagi Hasil		36 Laporan	151.947.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Blitar	36 Laporan	691.682.000	Pendapatan Bagi Hasil		36 Laporan	600.241.950
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	Kota Blitar	100 persen	179.061.700			100 persen	164.678.182
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Blitar	3 Unit	110.832.500	Pendapatan Bagi Hasil		3 Unit	108.694.807
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Blitar	61 Unit	67.197.500	Pendapatan Bagi Hasil		61 Unit	55.983.375
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Blitar	2 unit	1.031.700	Pendapatan Bagi Hasil		2 unit	1.031.700

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2025 memuat usulan rencana kegiatan prioritas urusan penanaman modal dan urusan penunjang peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan. Dalam pelaksanaan Renja terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dicapai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai juga.
- 2) Ketersediaan anggaran, namun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar program prioritas/unggulan tetap dapat dilaksanakan.

Agar target kinerja dan sasaran dalam Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 dapat dicapai maka perlu kaidah-kaidah pelaksanaan, yaitu:

1. Dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
2. Fokus pada pencapaian target kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar.
3. Tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra).
5. Capaian pelaksanaan kegiatan dalam Renja akan dijadikan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 adalah:

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP).
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana kelompok sasaran yang akan terlibat dalam kegiatan.
4. Menyusun kebutuhan administrasi kegiatan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan kegiatan.